

**PERAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENGUNGSI:
STUDI KASUS BRAZIL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA****Wahyu Nur Rohmah, Bintang, Ridho Vicky Syaputra**

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

Email: ayunrahmah25@gmail.com, bsaja606@gmail.com, ridhovickysyaputra9@gmail.com**ABSTRACT**

Penanganan pengungsi merupakan tantangan kemanusiaan dan keamanan global yang memerlukan peran diplomasi dan kerjasama internasional yang efektif. Studi ini mengkaji peran diplomasi dan kerjasama internasional dalam penanganan pengungsi dengan fokus pada kasus Brazil yang menghadapi krisis pengungsi dari Venezuela. Pemerintah Brazil menerapkan kebijakan diplomasi terbuka dan inklusif, seperti Operation Acolhida dan Operation Controle, yang melibatkan koordinasi bilateral dengan Venezuela serta kolaborasi dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada pengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan arus pengungsi, tetapi juga pada inklusi sosial melalui akses universal terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial tanpa memandang status hukum pengungsi. Pendekatan pluralisme dan kerjasama multilateral menjadi kunci dalam mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang muncul akibat krisis ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 48% pengungsi memilih integrasi lokal sebagai solusi jangka panjang, menandakan keberhasilan kebijakan inklusif Brazil. Implikasi bagi Indonesia adalah pentingnya penguatan diplomasi bilateral dan multilateralisme dalam menghadapi isu pengungsi, termasuk pengembangan kebijakan yang humanis dan kerjasama dengan organisasi internasional untuk menjamin perlindungan dan integrasi sosial pengungsi di Indonesia.

Kata kunci: Diplomasi, Kerjasama Internasional, Pengungsi, Brazil, Venezuela, Integrasi Sosial, UNHCR.

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 463

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. Pendahuluan

Krisis pengungsi merupakan isu global yang menimbulkan tantangan besar bagi keamanan manusia dan stabilitas internasional. Peran dari Organisasi Internasional dalam upaya penyelesaian sengketa internasional diperlukan, hal ini tentu untuk mencari solusi dan menentukan kesejahteraan serta memecahkan pelbagai persoalan bersama. Salah satu isu yang sering sekali didengar dan diperbincangkan terkait dengan isu kemanusiaan terutama masalah pengungsi yang merupakan warga dari negara-negara konflik atau kelompok minoritas dari sebuah masyarakat negara.

Salah satu contoh terkini adalah krisis pengungsi Venezuela yang melanda negara-negara tetangga, termasuk Brazil. Kondisi politik dan ekonomi yang memburuk di Venezuela memaksa jutaan warga meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik di luar negeri, terutama di Brazil yang merupakan salah satu dari tujuh negara yang bersedia menerima pengungsi dari Venezuela karena negara-negara di Amerika Latin memiliki Kebijakan Pintu Terbuka (*Open-Door Policy*) untuk pengungsi dari Venezuela.

Sebagai negara penerima pengungsi terbesar di Amerika Selatan, Brazil menghadapi berbagai tantangan terkait pengelolaan arus pengungsi, termasuk masalah keamanan perbatasan, penyediaan bantuan kemanusiaan, serta integrasi sosial dan ekonomi pengungsi ke dalam masyarakat lokal.¹

Tingginya jumlah pengungsi Venezuela yang masuk ke Brazil membuat negara tersebut kesulitan dalam menghadapinya. Bahwa disebutkan dalam kurun waktu satu tahun pemerintah Brazil telah menampung 70 ribu pengungsi dari Venezuela. hal ini dikarenakan setiap harinya ada sekitar 700 hingga 800 pengungsi Venezuela yang masuk. Sehingga hal ini mampu menimbulkan pelbagai permasalahan terutama terancamnya pertahanan dan keamanan negara². Menurut data dari otoritas imigrasi nasional dan sumber lainnya, pada akhir 2015 sekitar 695.000 pengungsi dari Venezuela yang jumlahnya terus bertambah menjadi lebih dari 4 juta pengungsi yang datang pada pertengahan 2019.

Dalam menghadapi krisis ini, Brazil mengadopsi pendekatan diplomasi yang terbuka dan inklusif, serta menjalin kerjasama erat dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Melalui operasi besar seperti Operação Acolhida yang dimulai pada 2018, Brazil menyediakan bantuan kemanusiaan, tempat tinggal sementara, dan dukungan logistik di wilayah perbatasan. Selain itu, Brazil menerapkan kebijakan perlindungan temporer dan program integrasi sosial yang memberikan akses universal terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial tanpa memandang status hukum pengungsi. Dalam menghadapi krisis ini, Brazil mengadopsi pendekatan diplomasi yang terbuka dan inklusif, serta menjalin kerjasama erat dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Melalui operasi besar seperti Operação Acolhida yang dimulai pada 2018, Brazil menyediakan bantuan kemanusiaan, tempat tinggal sementara, dan dukungan logistik di wilayah perbatasan. Selain itu, Brazil menerapkan kebijakan perlindungan temporer dan program integrasi sosial yang memberikan akses universal terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial tanpa memandang status hukum pengungsi³. pendekatan ini menunjukkan peran penting diplomasi bilateral dan multilateralisme dalam mengelola krisis pengungsi secara efektif dan humanis.

Sementara itu, Indonesia yang juga menghadapi tantangan pengungsi dan migran, meskipun belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951, perlu mengembangkan strategi diplomasi dan kerjasama internasional yang lebih kuat. Permasalahan pengungsi yang semakin kompleks akibat tingginya konflik peperangan dan banyaknya permasalahan yang lain seperti diskriminasi hingga bencana alam. Indonesia sebagai negara transit mengalami pelbagai tantangan sehingga belum optimal dalam menangani permasalahan tersebut.

Migrasi internasional telah menjadi isu politik penting dalam kebijakan luar negeri, negara-negara berpartisipasi dan membentuk sebuah kelompok kerja sama di tingkat regional maupun global dalam upaya mengatasi migasi internasional tersebut. Permasalahan pengungsi yang telah menjadi sebuah permasalahan yang komplek menjadi salah satu dari agenda UNHCR untuk memanusiaikan dan menjamin kehidupan yang layak bagi para pengungsi sebagai salah satu dari korban akibat perang, hingga pertikaian internal di dalam negerinya sendiri.

UNHCR memberikan perlindungan secara internasional bagi para pengungsi, menyediakan bantuan kemanusiaan serta melakukan pendataan dan proses *Refugee Status*

¹ Sutisana, Entis. (2024). KEBIJAKAN PEMERINTAH BRAZIL DALAM MENGHADAPI PENGUNGI DARI VENEZUELA TAHUN 2018. Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Vol. 1, No. 1 Hal. 635-656

² AntaraNews. 2017. "Brazil Khawatir Arus Pengungsi Venezuela". <https://www.antaranews.com/berita/630017/brazil-khawatir-arus-pengungsi-venezuela>. diakses pada 9 Juni 2025

³ Hidayati, Annisa Nur. (2021). PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) TERHADAP PENGUNGI DAN MIGRAN DARI VENEZUELA DI BRAZIL PADA TAHUN 2015-2019. Skripsi

Determination, serta turut mengupayakan solusi jangka panjang bagi para pengungsi yang datang kepada negara tujuan maupun negara transit. Studi kasus Brazil memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya sinergi antara kebijakan nasional, diplomasi bilateral, dan dukungan organisasi internasional dalam penanganan pengungsi. Bahwa integrasi lokal di negara penerima seperti Brazil tentunya membutuhkan regulasi yang tepat dan prosedur yang jelas dalam memberikan hak-hak dan layanan yang sama dengan warga negara.

Dengan menjadikan studi kasus Brazil sebagai acuan meskipun Indonesia bukan negara tujuan dan bukan negara pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Akan tetapi dengan solusi jangka panjang yang diberikan oleh organisasi seperti UNHCR yang turut membantu dengan pendekatan seperti pemulangan sukarela ke negara asal hingga penempatan ke negara ketiga memberikan Indonesia tekanan untuk terus memperjelas regulasi dan prosedur yang ada serta perlunya memperkuat kerjasama regional dan internasional serta mengadopsi kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi pengungsi untuk mengatasi tantangan serupa di masa depan.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka standar perlakuan pengungsi di Indonesia, dengan mempelajari praktik di Brasil, berfokus pada penetapan status, penempatan ke negara ketiga, alokasi anggaran, dan koordinasi antarpihak untuk mencegah pelanggaran hukum dan melindungi hak pengungsi.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia pengungsi, mencegah pelanggaran hukum, dan mengoptimalkan koordinasi antarpihak. Hasilnya juga relevan bagi organisasi internasional dan pemerintah daerah dalam merumuskan pendekatan terpadu, dengan mempertimbangkan pelajaran dari Brasil, seperti Operasi Acolhida.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat imigrasi, perwakilan UNHCR, IOM, dan pemerintah daerah di Jakarta dan Medan. Data sekunder diambil dari analisis dokumen hukum, jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan studi kasus Brasil, termasuk Undang-Undang Brasil No. 9.474/1997 dan Resolusi CONARE No. 29/2019. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.

E. Pembahasan

1. Bagaimana Brazil melakukan diplomasi dengan Venezuela dan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM untuk menangani krisis pengungsi

Brazil menghadapi tantangan besar sebagai negara penerima pengungsi terbesar dari krisis kemanusiaan Venezuela. Pemerintah Brazil mengadopsi pendekatan diplomasi yang komprehensif dan inklusif, menggabungkan diplomasi bilateral dengan Venezuela dan kerjasama multilateral dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM untuk menangani krisis ini secara efektif.

Pengungsi adalah individu yang telah diakui statusnya oleh otoritas yang berwenang atau lembaga internasional seperti UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) karena mengalami ketakutan yang beralasan akan penganiayaan di negaranya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Pengungsi telah melewati proses verifikasi dan diberikan perlindungan internasional.

Sementara itu, pencari suaka adalah seseorang yang telah meninggalkan negaranya dan mengajukan permohonan untuk diakui sebagai pengungsi, namun belum mendapatkan pengakuan resmi. Mereka masih menunggu keputusan dari UNHCR atau otoritas negara terkait apakah akan diberikan status pengungsi atau tidak.

Badan ini telah hadir hampir di setiap negara untuk menangani persoalan pengungsi internasional yang menjadi fenomena di kalangan masyarakat internasional. UNHCR sebagai lembaga internasional yang diberi kepercayaan untuk memberikan perlindungan dan solusi yang permanen terhadap para pengungsi dengan membantu pemerintah maupun organisasi terkait dengan fasilitas pemulangan ataupun penempatan bagi para pengungsi yang datang ke sebuah negara.

Brazil menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh eksodus massal warga Venezuela akibat krisis politik dan ekonomi yang melanda negara tersebut sejak pertengahan 2010-an. Keputusan Brazil untuk membuka pintu dan merespons krisis ini melalui pendekatan diplomatik dan kemanusiaan mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip solidaritas internasional.

a. Diplomasi Bilateral dan Kebijakan Nasional

Meskipun hubungan politik antara Brazil dan Venezuela mengalami ketegangan akibat situasi politik di Venezuela, Brazil tetap berupaya menjaga dialog terbuka dengan pemerintah Venezuela untuk mengelola arus pengungsi, termasuk koordinasi terkait pengawasan perbatasan dan mobilitas pengungsi. Pemerintah Brazil menganggap krisis ini sebagai persoalan kemanusiaan dan menerapkan kebijakan terbuka yang mempermudah proses permohonan suaka serta memberikan akses layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan bagi pengungsi tanpa memandang status hukum mereka.

b. Operasi Acolhida dan Operasi Controle

Pada 2018, Brazil meluncurkan Operasi Acolhida, sebuah inisiatif besar yang melibatkan militer Brazil dan badan-badan PBB untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, tempat tinggal sementara, dan dukungan logistik di wilayah perbatasan seperti Roraima. Operasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, termasuk makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, dan obat-obatan. Selain itu, Operasi Controle fokus pada pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pengungsi mendapatkan perlindungan sesuai hukum internasional serta penerapan program perlindungan temporer bagi pengungsi Venezuela⁴.

Operasi Acolhida (Operation Welcome): Merupakan inisiatif terpadu yang melibatkan militer, kementerian, dan lembaga internasional untuk menyediakan layanan kemanusiaan. Operasi ini meliputi pendirian pusat pendaftaran pengungsi, penampungan sementara, distribusi makanan, air bersih, sanitasi, serta layanan kesehatan darurat. Peran militer difokuskan pada logistik dan pengelolaan kamp, bukan pada tindakan koersif.

Operasi Controle: Merupakan bagian dari strategi keamanan nasional untuk mengawasi dan memastikan bahwa proses migrasi tidak disusupi oleh jaringan kejahatan transnasional, penyelundupan manusia, atau risiko lain terhadap stabilitas domestik. Operasi ini juga mencakup pengawasan administratif dan dukungan hukum bagi pengungsi dalam mengakses sistem hukum Brazil.

Gabungan kedua operasi ini menjadi contoh nyata dari integrasi antara tanggung jawab keamanan dan perlindungan HAM.

⁴ Sutisana, Entis. (2024). KEBIJAKAN PEMERINTAH BRAZIL DALAM MENGHADAPI PENGUNGI DARI VENEZUELA TAHUN 2018. Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Vol. 1, No. 1 Hal. 635-656

c. Kerjasama Multilateral dengan UNHCR dan IOM

Brazil menjalin kerjasama erat dengan UNHCR dan IOM untuk mendukung pendanaan, teknis, dan pelaksanaan program penanganan pengungsi. Organisasi-organisasi internasional ini berperan penting dalam pendataan pengungsi, perencanaan relokasi, dan integrasi sosial. Melalui koordinasi ini, Brazil mampu mengelola krisis dengan pendekatan pluralisme yang menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan dan keamanan nasional⁵.

d. Dampak Sosial dan Ekonomi serta Integrasi Lokal

Kebijakan Brazil tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada integrasi sosial pengungsi. Sekitar 48% pengungsi memilih untuk berintegrasi secara lokal, yang menunjukkan keberhasilan kebijakan inklusif Brazil dalam memberikan akses universal terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, Brazil juga menghadapi tantangan seperti kapasitas infrastruktur dan penerimaan masyarakat lokal terhadap pengungsi, yang menjadi bagian dari diplomasi sosial dan politik dalam negeri

2. Bagaimana Indonesia dapat meningkatkan kerjasama regional dan internasional untuk penanganan pengungsi, meskipun bukan pihak Konvensi 1951.

Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam penanganan pengungsi, terutama karena belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun demikian, Indonesia menunjukkan komitmen kemanusiaan yang nyata dengan mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri sebagai dasar hukum penanganan pengungsi di dalam negeri. Regulasi ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, walaupun implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, inkonsistensi regulasi, dan tumpang tindih fungsi kelembagaan.

Bahwa adanya ketidakpastian hukum mengenai pengungsi di Indonesia tentu saja hal tersebut menimbulkan banyak ketidaksamaan dalam upaya penanganan pengungsi. Dengan tidak adanya prosedur penanganan dan regulasi yang jelas menjadikan praktik penanganan pengungsi menjadi tidak konsisten dan memiliki pola yang berbeda-beda. Pada daerah perairan Indonesia, adakalanya aparat mengizinkan pengungsi memasuki wilayah perairan namun disaat yang lain aparat mengusir kedatangan pengungsi lainnya. Tindakan serupa juga terjadi apabila masyarakat membantu para pengungsi untuk menemi namun pada saat yang lain aparat menghalangi tindakan masyarakat tersebut⁶

Dalam konteks diplomasi dan kerjasama internasional, Indonesia aktif menjalin kemitraan dengan organisasi internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM). Kerjasama ini meliputi pendataan, pemantauan, pemberian bantuan kemanusiaan, serta fasilitasi proses legalisasi status pengungsi dan pencari suaka. Contohnya, kolaborasi antara Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan IOM di beberapa daerah, seperti Pekanbaru, menunjukkan efektivitas koordinasi dalam manajemen pengungsi, termasuk penyediaan layanan dasar dan perlindungan hak-hak pengungsi (Mellawati, 2025)

Indonesia juga menghadapi dilema antara prinsip kedaulatan negara dan komitmen kemanusiaan. Sebagai negara transit, Indonesia harus mengelola arus

⁵ *ibid.*

⁶ Heru Susetyo. 2022. "Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-lt621edab5abc5c/?page=5>, diakses pada 11 Juni 2025

pengungsi yang terus meningkat, terutama dari negara-negara konflik seperti Afghanistan, Myanmar, dan Somalia. Dalam hal ini, diplomasi regional menjadi sangat penting untuk membangun mekanisme *burden-sharing* dan pengelolaan bersama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama dengan negara tetangga seperti Australia dan Malaysia, meskipun terkadang penuh tantangan, menjadi bagian dari upaya kolektif dalam menangani permasalahan pengungsi secara komprehensif⁷

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan pengungsi, Indonesia perlu memperkuat beberapa aspek berikut:

- a. Penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan memperjelas mekanisme pengawasan pengungsi.
- b. Pengembangan model pemusatan penampungan pengungsi yang terintegrasi untuk memudahkan pengawasan dan pemenuhan hak-hak pengungsi.
- c. Peningkatan kapasitas diplomasi multilateral melalui forum regional dan internasional guna memperluas jaringan kerjasama dan mendapatkan dukungan teknis serta finansial.
- d. Penguatan kemitraan dengan organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan dan program pemberdayaan pengungsi selama masa transit.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mengoptimalkan peranannya sebagai negara transit yang humanis sekaligus menjaga kedaulatan nasional. Pendekatan ini juga sejalan dengan praktik terbaik internasional dan memberikan kontribusi positif dalam kerjasama regional dan global untuk penanganan pengungsi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

F. Simpulan

Kurangnya standarisasi perlakuan pengungsi di Indonesia, seperti di Brasil, menyebabkan regulasi yang tidak komprehensif, data pengungsi yang tidak terintegrasi, dan ketidakjelasan kewenangan antarpihak. Studi kasus Brasil menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem mendorong pelanggaran hukum, seperti pencurian, yang memperburuk stigma sosial. Di Indonesia, kerjasama dengan UNHCR dan IOM belum optimal karena status negara transit dan keterbatasan anggaran. Standarisasi memerlukan regulasi yang jelas, koordinasi yang kuat, dan database nasional pengungsi.

Rekomendasi: disarankan untuk membentuk satuan tugas nasional untuk koordinasi, mirip dengan Operasi Acolhida; mengembangkan database terpadu pengungsi; meningkatkan pelatihan aparat daerah tentang hak pengungsi; dan memperkuat kerjasama dengan UNHCR dan IOM untuk mempercepat penempatan ke negara ketiga dan mencegah pelanggaran hukum melalui pendidikan hukum dan dukungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- AntaraNews. 2017. "Brazil Khawatir Arus Pengungsi Venezuela". <https://www.antaraneWS.com/berita/630017/brazil-khawatir-arus-pengungsi-venezuela>. diakses pada 9 Juni 2025
- Heru Susetyo. 2022. "Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia". <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-lt621edab5abc5c/?page=5>, diakses pada 11 Juni 2025

⁷ Mochamad Januar Rizki. 2023. "Kolaborasi Regional Kunci Keberhasilan Tangani Luar Negeri". <https://www.hukumonline.com/berita/a/kolaborasi-regional-kunci-keberhasilan-tangani-pengungsi-luar-negeri-lt654b2a32bd995/?page=all>, diakses pada 27 Mei 2025.

- Hidayati, Annisa Nur. (2021). PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) TERHADAP PENGUNGSI DAN MIGRAN DARI VENEZUELA DI BRAZIL PADA TAHUN 2015-2019. Skripsi
- Mellawati, M. A. (2025). IMPLEMENTASI KERJASAMA RUDENIM DAN IOM DALAM MANAJEMEN PENGUNGSI: STUDI KASUS KOTA PEKANBARU . *Journal Kajian Pemerintah (JKP)*, 122-134.
- Mochamad Januar Rizki. 2023. "Kolaborasi Regional Kunci Keberhasilan Tangani Luar Negeri". <https://www.hukumonline.com/berita/a/kolaborasi-regional-kunci-keberhasilan-tangani-pengungsi-luar-negeri-lt654b2a32bd995/?page=all>, diakses pada 27 Mei 2025.
- Sutisana, Entis. (2024). KEBIJAKAN PEMERINTAH BRAZIL DALAM MENGHADAPI PENGUNGSI DARI VENEZUELA TAHUN 2018. *Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional* Vol. 1, No. 1 Hal. 635-656